

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DI KECAMATAN
BATANG SERANGAN KAB. LANGKAT**

SKRIPSI

OLEH

**SRI NOVIA IMELDA BR SEMBIRING
148320289**



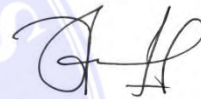
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pembangunan Daerah di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat
Nama : SRI NOVIA IMELDA BR SEMBIRING
NPM : 148320289
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :
Komisi
Pembimbing



Ir. M. Yamin Siregar, MM
Pembimbing I



Eka Setia Dewi Tarigan, SE, M.Si
Pembimbing II



Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si
Dekan



Adelina Lubis, SE, M.Si
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 04 Juni 2018

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pembangunan Daerah di Desa Namu Sialang Kecamatan Batang Serangan Kab.langkat. Penelitian asosiatif kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran 14 dusun pada tahun 2016 sampai dengan 2014,dengan data penelitian yang berjumlah sebanyak dusun.

Pada pengujian regresi linear berganda membuktikan bahwa variabel pendapatan asli daerah menunjukkan hasil dengan koefisien regresi sebesar 0,544 dan variabel dana alokasi umum menunjukkan hasil dengan koefisien regresi sebesar 0,589 yang mempengaruhi pembangunan daerah secara positif dan signifikan, nilai signifikan untuk kuesioner pendapatan asli daerah $0,008 < 0,05$ maka pendapatan asli daerah (X_1) signifikan mempengaruhi pembangunan daerah (Y) dan nilai signifikan untuk kuesioner dana alokasi umum $0,018 < 0,05$ maka dana alokasi umum (X_2) signifikan mempengaruhi pembangunan daerah (Y). Nilai t hitung variabel pendapatan asli daerah (X_1) $2.893 >$ nilai t tabel 1.71088 dan nilai signifikan $0,008 < 0.05$ dan nilai t hitung variabel dana alokasi umum (X_2) $2.542 >$ nilai t tabel 1.71088 dengan nilai signifikan $0,018 < 0,05$ bahwa faktor-faktor pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan daerah (Y). Nilai F hitung $6.733 >$ nilai F tabel 3.40 dan nilai signifikan $0,005 < 0,05$ bahwa faktor-faktor pendapatan asli daerah (X_1) dan dana alokasi umum (X_2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan daerah. Nilai Adjusted R Square untuk pembangunan daerah (Y) di di Desa Namu Sialang Kecamatan Batang Serangan Kab.langkat adalah 0.306 . Hal ini berarti $30,6\%$ variasi pembangunan daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel pendapatan asli daerah (X_1) dan dana alokasi umum (X_2) dan sisanya $69,4 \%$ ditentukan oleh variabel lain di luar kontribusi penelitian ini.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pembangunan Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study To determine the effect of Original Income and General Allocation Funds to Regional Development in Namu Sialang Village District Batang Serangan Kab.langkat. Quantitative associative research is a study that aims to determine the relationship between two or more variables.

The research sample used in this research is the report of reallocation of 14 dusun budget in 2016 until 2014, with data of research which amount as much as hamlet. Multiple linear regression test proves that the original revenue variable shows the result with the regression coefficient of 0,544 and the variable of general allocation fund shows the result with regression coefficient equal to 0,589 which influences the regional development positively and significantly, significant value for original income questionnaire $0,008 < 0,05$, local revenue (X1) significantly affects regional development (Y) and significant value for general fund allocation questionnaire $0.018 < 0.05$ then general allocation funds (X2) significantly affect regional development (Y). The value of t arithmetic variable of local revenue (X1) $2.893 > t$ value table 1.71088 and significant value $0.008 < 0.05$ and the value of t the variable of general allocation fund (X2) $2.542 > t$ value table 1.71088 with significant value $0.018 < 0.05$ local revenue factor and general allocation fund partially have a positive and significant impact on regional development (Y). F value of $6.733 > F$ value of table 3.40 and significant value of $0.005 < 0.05$ that the factors of local revenues (X1) and general allocation funds (X2) simultaneously fell positively and significantly to regional development. The value of Adjusted R Square for regional development (Y) in the village of Namu Sialang District Batang Serangan Kab.langkat is 0.306 . This means that 30.6% of regional development variation (Y) is influenced by the variable of local revenue (X1) and general allocation fund (X2) and the rest $69,4\%$ is determined by other variable outside contribution of this research.

Keywords: *Local Revenue, General Allocation Fund and Regional Development*

KATA PENGANTAR

Mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pembangunan Daerah Pada desa Namu Sialang Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat ”**.

Perlu kita ketahui tujuan utama dari penulisan skripsi ini tiada lain adalah sebagai salah satu syarat kelulusan dalam pendidikan Strata I serta untuk menambah wawasan, pengetahuan lebih jauh dalam bidang ilmu manajemen, pengalaman bagi penulis yang mungkin akan di implementasikan dan menjadi bekal penulis di kemudian hari ketika memasuki dunia kerja.

Sesungguhnya laporan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi, MSi., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Adelina Lubis, SE, MSi., selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan area.
4. Bapak Ir. M. Yamin Siregar, MM, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis dan banyak memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang berkomunikasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Eka Setia Dewi Tarigan, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis dan banyak memberikan bimbingan dan masukan yang berkomunikasi dalam penyelesain skripsi ini.

6. Ibu Hesti Sabrina, SE, MSi, selaku sekretaris yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam setiap urusan berhubungan dengan skripsi ini.
7. Kepada Ayahanda dan Ibunda yang tercinta dimana karena doa, usaha, semangat, ajaran dan motivasi dari mereka berdua sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat – sahabatku Dwi Rosa SM, Rinanda Putri Syflia, Nining Sri Wahyuni, Karnando, Rida Oktari SM yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat teman-temanku Putri Sitepu Spd, Emia Bangun, Mika Bangun yang menghibur penulis dan menyemangati disaat susah maupun senang.
10. Teman – temanku Manajemen kelas A stambuk 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, oleh karena itu dimasa mendatang akan lebih baik. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya atas segala kekurangan dan penulis juga berharap mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Medan, April 2018

Penulis,

Sri Novia Imelda Br Sembiring
14.832.0289

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	7
2.2. Pendapatan Asli Daerah.....	8
2.2.1. Dana Perimbangan.....	11
2.3. Dana Alokasi Umum.....	11
2.4. Pembangunan Daerah.....	17
2.5. Penelitian Sebelumnya.....	19
2.6. Kerangka Konseptual.....	20
2.7. Hipotesis.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Pendekatan penelitian.....	22
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
3.3. Defenisi Oprasional Variabel.....	23
3.4. Populasi dan Sampel.....	24
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data	26
3.7. Teknik Analisis Data.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian	
4.1.1. Sejarah Objek Penelitian.....	31
4.1.2. Struktur Organisasi.....	33
4.2. Hasil Penelitian	
4.2.1. Uji Asumsi Klasik.....	33
4.2.2. Uji Regresi Linear Berganda.....	37
4.2.3. Uji Hipotesis.....	39
4.3. Pembahasan.....	42
4.3.1. Pengaruh PAD terhadap Pembangunan Daerah di Kecamatan Batang Serangan Kab.Langkat.....	43
4.3.2. Pengaruh DAU terhadap Pembangunan Daerah di Kecamatan Batang Serangan Kab.Langkat.....	43
4.3.3. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Pembangunan Daerah di Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	46
5.2. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan di Indonesia. Salah satunya adalah dikeluarkannya kebijakan pada sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 pasal tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dengan demikian desentralisasi keuangan dan otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan suatu tata kelola pemerintah yang baik (*good government*).

Di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan wewenang tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan juga memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana, dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antara daerah, serta mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi baru.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali potensi yang dapat menjadi sumber-sumber keuangan yang dihasilkan dalam Sumber Daya Alam (SDA) guna untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah dan pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah sendiri yang merupakan sumber keuangan yang murni dihasilkan oleh daerah itu sendiri baik yang bersumber dari pajak maupun yang berasal dari pemanfaatan SDA. Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu meningkatkan PAD-nya yang merupakan tolak ukur terwujudnya suatu penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang tercermin dalam penerimaan transfer dari pusat atau yang disebut dengan Dana Perimbangan.

Dana perimbangan itu sendiri adalah dana yang diterima oleh pemerintah daerah yang merupakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan antar daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah serta menjamin tercapainya pelayanan publik di seluruh negeri secara merata.

Kecamatan Batang Serangan merupakan wilayah yang didominasi dengan lahan pertanian. dan masyarakat setempat pun bermata pencarian sebagai petani, letak kecamatan Batang Serangan yang dekat dengan aliran sungai Batang Serangan membuat beberapa desa terhambat memasarkan hasil kebun mereka apalagi saat musim penghujan tiba maka air sungai akan meluap dan para petani harus memutar balik jalan yang jarak tempuhnya dua kali lipat lebih jauh di tambah akses jalan yang rusak itu menambah pengeluaran petani untuk memasarkan hasil kebun mereka.

Kecamatan Batang Serangan juga dikenal dengan tempat wisata yaitu Ekowisata Tangkahan. tapi dengan akses jalan yang kurang baik membuat minat pengunjung menurun, dengan menurunnya minat pengunjung akan berdampak pada masyarakat setempat yang bermata pencarian di Ekowisata Tangkahan.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Berdasarkan fungsinya pemerintah daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Daerah (legislatif) terjadi hubungan keagenan. Secara implisit, praturan perundang-undangan merupakan perjanjian antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke pemerintah daerah. Dalam praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh pemerintah daerah “dilaporkan” di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua

dana tersebut semua diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hingga kini dana perimbangan masih merupakan penerimaan terbesar daerah. Tingginya perbandingan ini berarti bahwa pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana yang diterima dari pusat dari pada menggunakan dana yang dihasilkan sendiri, hal ini menunjukkan bahwa di pemerintahan daerah Kabupaten/Kota tersebut telah terjadi *flypaper effect*.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan sumber daya alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan dana alokasi umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-Undang No.33 Tahun 2004).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan guna menguji pengaruh penerimaan daerah terhadap pembangunan daerah. Penerimaan daerah sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi yang diperuntungkan untuk daerah dan usaha mandiri daerah atau yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah, yang kedua transfer dari pusat yang disebut Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi

Hasil, Dana Alokasi umum, dan Dana Alokasi Khusus. Beberapa diantaranya juga menguji kecenderungan pemerintah daerah yang lebih menggantungkan diri pada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan dibandingkan berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri.

Banyak para peneliti telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pembangunan Daerah Pada desa Namu Sialang Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pembangunan Daerah pada Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pembangunan Daerah pada Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pembangunan di Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pembangunan Daerah di Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pembangunan Daerah di Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat

3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pembangunan Daerah di Kecamatan Batang Serangan Kab.langkat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai informasi ilmiah dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis yang berkaitan dengan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu juga untuk sebagai bahan masukan dan referensi bagi pembaca dan peneliti lainnya untuk menganalisis dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Pemerintah dalam mengambil langkah dan kebijakan yang berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum serta pengalokasian untuk Pembangunan Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah secara proporsional dan disajikan secara transparan sehingga dapat terwujud *good governanc*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD berisi tentang perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut.

Anggaran juga tidak hanya sebagai rencana keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan serta pusat pertanggungjawaban dalam suatu pemerintahan tetapi juga merupakan alat bagi anggota dewan untuk proses pengendalian, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi kinerja para lembaga eksekutif.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Proses dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat enam fase yang harus dilalui, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan umum APBD
2. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran
3. Penyiapan surat edaran kepada daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKDP
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKDP
5. Penyiapan rencana peraturan daerah APBD
6. Evaluasi rencana peraturan daerah APBD

Secara garis besar struktur dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerahnya.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang Undang No.33 Tahun 2004. “sumber-sumber penerimaan daerah adalah sebagai berikut:

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.;

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan. dan
3. Lain-lain Pendapatan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana jadangan daerah, dan
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengeolaan Sumber Daya Alam.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi hasil daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana yang sesungguhnya

yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu:

Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Bumi Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, pajak parkir.

2. Retribusi Daerah

Merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan

kinerja, jenis pendapatan yang berawal dari pajak daerah dan retrebusi daerah. Retrebusi daerah terdiri dari: Retrebusi Jasa Umum, Retrebusi Jasa Usaha, Retrebusi Perijinan Tertentu.

3. Laba Perusahaan Milik Daerah

Adalah hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: Bagian laba perusahaan milik daerah, Bagian lembaga keuangan bank, Bagian laba lembaga keuangan non bank, Bagian laba atas pernyataan modal/invtasi.

4. Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang Sah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapat daerah tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpana giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor.

Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah dan kemauan daerah dalam penggalan potensi itu sendiri. Semakin besar potensi yang dimiliki daerah dan kemauan daerah dalam menggali potensi tersebut maka pendapatan asli daerah pun akan semakin besar.

2.2.1 Dana Perimbangan

Menurut Pemendagri No.13/2006 “dana perimbangan dapat dikelompokkan menurut jenis pendapatannya yaitu:

1. Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan yang terdiri atas:
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
2. Jenis dana bagi hasil dirinci yang mencakup:
 - a. Bagi hasil pajak
 - b. Bagi hasil bukan pajak

Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.

2.3.Dana Alokasi Umum

Pengertian Dana alokasi Umum menurut pasal 1 UU RI No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa:”Dana Alokasi Umum,selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut Sonny Sumarsono (2010:90) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.Dana alokasi umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN,dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBN.Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”

Menurut Deddi Nordiawan dkk (2008:90) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan untuk provinsi dan Kabupaten/Kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam jumlah sebagai berikut:

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Dalam Negeri Neto.
2. Proposi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 10% dan 90%.

Menurut Muindro Renyowijoyo (2008:223) “Dana Alokasi Umum dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU nya ditetapkan sesuai Undang-Undang (pasal 161)”

Terkait dengan perhitungan dana alokasi umum, dimana dana alokasi umum digunakan sebagai instrumen perimbangan keuangan antar daerah dengan konsep yang dipakai adalah kesenjangan fiskal (*fiskal gap*). Secara konsep, dana alokasi umum digunakan untuk menutup kesenjangan yang terjadi karena

kebutuhan daerah ternyata lebih besar dari potensi daerah (kapasitas daerah). Dengan demikian, daerah-daerah yang mempunyai kapasitas fiskal relatif besar akan memperoleh dana alokasi umum yang relatif kecil di bandingkan dengan daerah-daerah yang miskin (kapasitas fiskal rendah).

Dalam perhitungan dana alokasi umum diakui memang terdapat banyak kelemahan sehingga konsep *fiskal gap* belum dapat dioptimalkan dan daerah-daerah maju/kaya juga memperoleh dana alokasi umum yang relatif besar. Kondisi ini coba untuk diperbaiki dengan formulasi dana alokasi umum, sehingga ada beberapa daerah yang penerimaan dana alokasi umumnya dikoreksi dan memperoleh dana alokasi yang lebih kecil.

Adanya penurunan dana alokasi umum telah menimbulkan kecemasan keras dari beberapa daerah yang mengalami penurunan tersebut dan mengharap kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali formula dan perhitungan agar tidak terjadi penurunan. Dalam hal ini, ada beberapa pola pandang antara pemerintah pusat, dan daerah mengenai dana alokasi umum. Bagi pemerintah pusat, pengalokasian dana alokasi umum dimaksudkan sebagai instrumen horizontal *imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiskal gap* didalam struktur keuangan daerah, sementara bagi daerah, alokasi dana alokasi umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan daerah. Perbedaan tersebut sering bermasalah ketika daerah minta kepada pusat untuk memberikan dana alokasi umum dengan kebutuhan daerah.

Konsep dasar formulasi dana alokasi umum sebagaimana yang dimanfaatkan dalam undang-undang No.32 tahun 2004 itu secara implisit merupakan penjabaran dari teori governmental transfer yang berbasis kepada

konsep *fiscal gap*, nantinya kesenjangan fiskal yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer pemerintah pusat.

Transfer dana *alokasi* umum dapat digolongkan sebagai bantuan umum. Namun, karena situasi dan kondisi keuangan yang dihadapi, pemerintah daerah terpaksa mengalokasikan dana alokasi umum untuk membiayai gaji. Inpres sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam transfer tak bersyarat karena merupakan bantuan umum (*block grant*). Beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk grant kepada pemerintah daerah adalah:

1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*).
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*).
3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
4. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi pajak daerah.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relatif besar. Dengan maksud melihat

kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, pemerintahan pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan dana alokasi umum minimal sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri. Dana alokasi umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Dalam masa transisi pelaksanaan desentralisasi fiskal lebih terjadi ketidaksesuaian pembiayaan, baik positif ketidaksesuaian maupun negatif. Hal ini terutama disebabkan masih terdapatnya "grey area" yang cukup luas dalam hal pemisahan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Pada dasarnya kewenangan kabupaten dan kota adalah seluruh kewenangan selain yang dipegang provinsi.

Dari efisien ini dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain juga sebagai sumber pembiayaan daerah. Hal ini berarti pemberian dana alokasi umum

lebih di perioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan meendapat jumlah dana alokasi umum yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah dalam memasuki era otonomi.

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah “Bahwa kbutuhan DAU oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari pootensi penerimaan daerah yang ada”.

Ketentuan perolehan DAU untuk kabupaten/kota PP No.55 Tahun 2005 pasal 45 yaitu:

1. Daerah yang memiliki celah fiskal lebih dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
2. Daerah yang memiliki celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar.
3. Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal DAU.
4. Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

2.4. Pembangunan Daerah

Menurut Sjafrizal (2009:15), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah,

dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah (Riyadi, Deddy Supriadi Bratakusumah, 2004 :7) dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang diaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegangan pada azas prioritas.

Berarti, perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada didalamnya. Pentingnya orientasi holistik dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang terelakan. Tetapi di pihak lain adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Suprady Bratakusumah(2004:8) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi,

sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumber daya fisik, sumberdaya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya lainnya. Dalam konteks ini ia meenyebutnya dengan istilah pembangunan endogen, atau dengan kata lain pembangunan yang berbasis potensi. Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan kondisi spatial suatu daerah juga menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan mencakup suatu ruang tertentu, sehingga diperlukan adanya penataan ruang yang efektif, dimana tataruang akan mempengaruhi proses pembangunan beserta implikasinya.

Ciri-ciri pembangunan daerah menurut Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004:9) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.
2. Analisis perencanaan bersifat makro/luas
3. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang.
4. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.
5. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan).

2.5. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Daftar Peneliti Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Nurindah Rahmawati (2010)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2) Belanja Daerah (Y)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah

2.	Taufik Akbar (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada Pemerintah kota Bandung tahun anggaran 2005-2006)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2) Belanja Modal (Y)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal
3.	Pransiska Roosiana Kurniawati (2010)	Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah provinsi, kota, dan Kabupaten di Indonesia	Dana Alokasi Umum (X1) Pendapatan Asli Daerah (X2) Belanja Daerah (Y)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah. Kesimpulan lain pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap Belanja daerah.
4.	Erwin Ginting (2008)	Pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dalam Belanja pada Pemerintahan Kabupaten Karo.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2) Belanja (Y)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintahan kabupaten karoba berusaha mengoptimalkan PAD dan DAU sebagai sumber penerimaan daerah. Kesimpulan lain pengalokasian DAU dan PAD dalam belanja pemerintahan kabupaten karoba

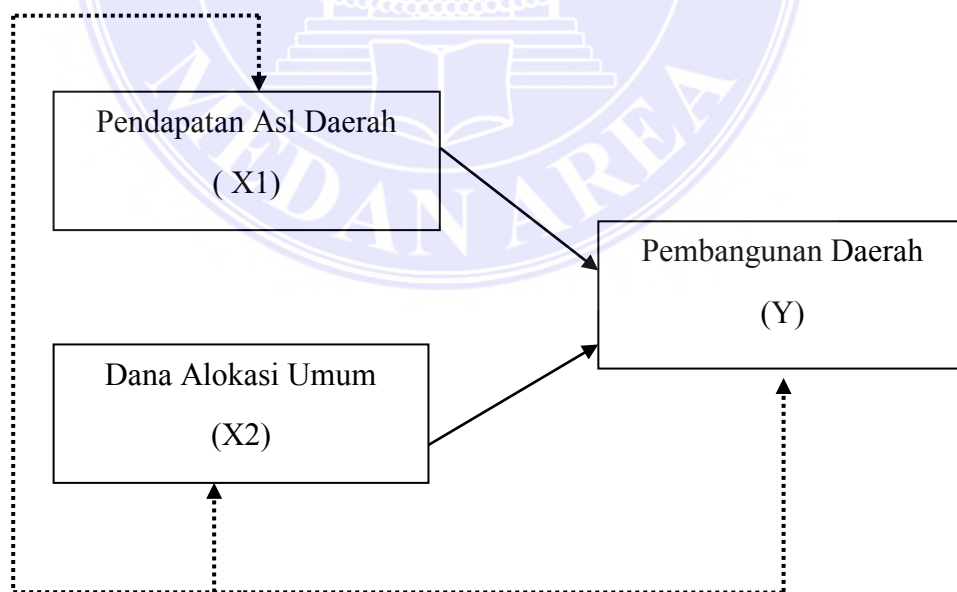
(sumber penulis 2018)

2.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesis dari tujuan teori dan penelitian terdahulu yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis.

Menurut Deddi Nordiawan dkk (2008:56), “Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan yang telah diuraikan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan:..... :Garis Putus-Putus adalah Simultan
 _____ :Garis Tegas adalah Persial

2.7.Hipotesis

Menurut Rusiadi dkk (2014:74) “Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data/informasi yang dikumpulkan melalui sampel”.

Dengan adanya dasar pendapatan tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah pendapaataan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian asosiatif kuantitatif. Menurut Rusiadi (2014:12), Penelitian asosiatif kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu permasalahan. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pembangunan Daerah.

3.2. Tempat dan waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi atas suatu objek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Namu Sialang kec. Batang serangan kab. Langkat.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November 2017 sampai dengan Juni 2018.

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2017-2018					
		Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei
1	Pengajuan Judul Skripsi	■					
2	Pembuatan Proposal		■				
3	Bimbingan Proposal		■	■			
4	Seminar Proposal			■			
5	Pengumpulan data dan Analisis data				■		
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi				■	■	
7	Seminar Hasil					■	
8	Sidang Meja Hijau						■

(sumber:peneliti)

3.3. Defenisi oprasional variabe

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu, variabel bebas pertama Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), dan 1 variabel terikat yaitu Pembangunan (Y).

2. Defenisi Oprasioanal.

Defenisi oprasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara oprasional dilapangan. Defenisi oprasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan defenisi atau gabungan keduanya, yang ada di lapangan.

Tabel 3.2 Oprasional variable.

No	Pengukuran	Defenisi	Pengukuran	Skala
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah Daerah yang berasal dari pos-pos penerimaan daerah yang murni dihasilkan oleh daerah itu sendiri.	1. pajak daerah ditambah 2. Retrebusi daerah 3. pengelolaan kekayaan daerah	Rasio
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum adalah dana transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat k pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan hrizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan.	Realisasi Dana Alokasi Umum didalam LRA	Rasio
3.	Pembangunan Daerah	Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta psrtisipasi masyarakat	1. Pendidikan masyarakat 2. Kesehatan masyarakt 3. Kesehjatraan Keluarga	Rasio

(sumber penulis 2018)

3.4.Populasi dan sample

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Rusiadi,2014:30), populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh dusun di desa Namu Sialang sebanyak 14 dusun.

2. Sample

Sample adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Rusiadi, 2014:31), Dalam penelitian penulisan mengambil sample dari seluruh populasi.

Sample penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran 14 dusun pada tahun 2016 sampai dengan 2014, dengan data penelitian yang berjumlah sebanyak dusun.

3.5. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder desa Namu Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat. Data tersebut berupa laporan keuangan yang didapat dari desa Namu Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

2. Sumber data

Adapun sumber data tersebut diperoleh dari:

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi

Penelitian ini meliputi data tahunan dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Penggunaan data beberapa periode akan mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pembangunan Daerah di desa Namu Sialang Kecamatan Batang Srgan Kabupaten Langkat.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dan diolah dari desa Namu Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear yang berbasis *ordinary least square* (OLS)

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2009:99). Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas, dapat dianalisis dengan melihat nilai probabilitas $>0,05$, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2009:28) uji ini bertujuan untuk mengetahui antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam regresi saling berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasi tinggi atau bahkan 1). Konsekuensi bagi model regresi yang mengandung multikolinieritas adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel independen, tingkat signifikan yang digunakan untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar, akibatnya model

regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi adalah melihat nilai *tolerance* dan lawanya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas lainnya. Nilainya *cut off* yang umumnya digunakan adalah *tolerance* 0,10 sama dengan VIF di atas 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Scatter Plot* yang menyatakan bahwa model regresi linier berganda tidak terdapat

heteroskedastisitas jika:

Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.

Titik-titik data tidak hanya mengumpul di atas dan di bawah saja.

Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

2. Analisis Regresi Linier Berganda.

Model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5 persen. Model regresi yang digunakan adalah :

$$\hat{Y} = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \epsilon$$

Keterangan :

\hat{Y} = Pembangunan Daerah Desa Namu Sialang Kecamatan Btang Sragan
Kabupaten Langkat

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

β = Konstanta

ϵ = Error

3. Hipotesis.

a. Uji Parsial (Uji t statistik)

Menurut Imam Ghozali, (2009:17) uji statistik t dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variable independen lainnya konstan. Untuk memutuskan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial adalah dengan cara membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan (5%). Apabila nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel, maka keputusannya adalah menolak hipotesis nol (H_0). Artinya, variabel independen (X) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen (Y). Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan dilakukan uji t dengan rumus sebagai berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pembangunan Daerah

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan Daerah.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan Daerah.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengaruh keputusan (KPK) adalah :

Terima H_0 (tolak H_a) apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig > \alpha$ 5%

Terima H_0 (terima H_a) apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig < \alpha$ 5%

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pembangunan Daerah

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan Daerah.

$H_a : \beta_2 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan Daerah.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengaruh keputusan (KPK) adalah :

Terima H_0 (tolak H_a) apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig > \alpha$ 5%

Terima H_0 (terima H_a) apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig < \alpha$ 5%

b. Uji Simultan (Uji F statistik)

Menurut Imam Ghozali, (2009:16) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen/terikat. Hasil output regresi dengan SPSS akan terlihat nilai F_{hitung} dan nilai signifikansinya. Untuk memutuskan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan adalah dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan (5%). Apabila nilai F_{hitung} lebih kecil dari nilai F_{tabel} , maka keputusannya adalah menerima hipotesis nol (H_0). Artinya variabel independen (X) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Pengujian ini menggunakan rumus statistik:

$$F = \frac{R^2}{(1-R^2)} \cdot \frac{(n-k-1)}{k}$$

Keterangan:

R = Koefisien korelasi berganda

K = Jumlah variabel bebas

$n =$ Jumlah data

Hipotesis untuk pengujian secara simultan adalah:

$H_0 : \beta_1 = : \beta_2 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (jumlah anggota dan jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha)

$H_a : \text{minimal } 1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan (jumlah anggota dan jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha)

Pengujian signifikan dengan kriteria pengaruh keputusan (KPK) adalah :

Terima H_0 (tolak H_a) apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig > \alpha 5\%$

Terima H_0 (terima H_a) apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig < \alpha 5\%$

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali, (2009:18) koefisien Determinasi (R^2) adalah intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variable independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Cara menghitung koefisien determinasi yaitu $R^2 \times 100\%$.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, Suprady. 2008. *Pencanaan Pembangunan Daerah: strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta, pt Gramedia pustaka utama.
- Imam, Ghozali. 2009. *Aplikasi Analisis multivariial dengan program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Nordiawan, Deddi, et all. 2008. *Akutansi pemerintah, Terbitan pertama*. Jakarta: salemba empat
- Nurmalinda, 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten langkat*. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Rusiadi, et all. 2014. *Metodologi peneitian konsep, kasus dan aplikasi SPSS eviews, amos, lisrel*. USU press: medan.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Erwin Ginting,2008.*Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Dalam Belanja pada Pemerintah Kabupaten Karo*.Skripsi Universitas Sumatra Utara,Medan

WWW.academia.edu/INDIKATORDANKARAKTERISTIKPEMBANGUNANDESASEBAGAIBASISISIMPLEMENTASIATASUNDANG-UNDNGDSA.diakses tanggal 11 febuari 2018

Wijoyonarko,Denny,2015.Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU),dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota provinsi jawa tengah priode 2012-2013.

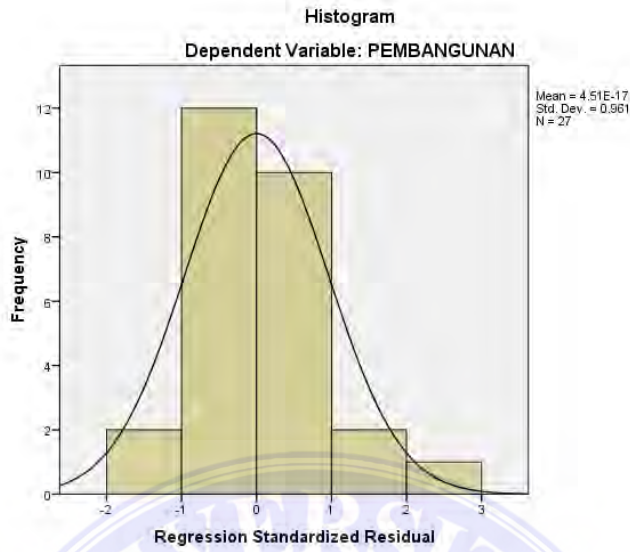


LAMPIRAN
TABULASI DATA

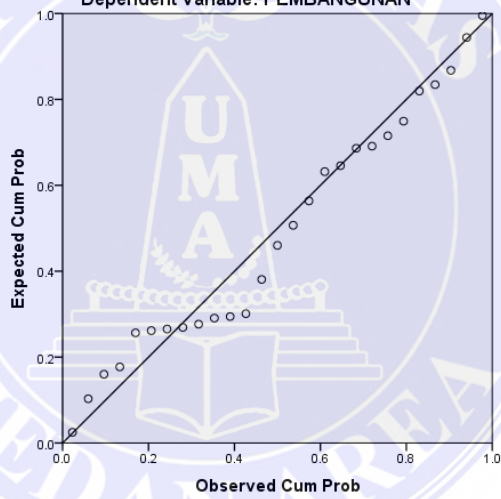
DESA	TAHUN		
	2015	2016	2017
NAMOSIALANG			
PAD			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12,000,000	12,000,000	12,000,000
Pendapatan Transfer	240,543,000	354,443,000	1,476,586,000
Dana Desa	100,698,000	125,035,000	804,135,000
Bagi Hasil Pjk dan Retribusi	8,112,000.00	10,500,000	15,814,000
Alokasi Dana Desa	70,504,000	102,183,000	656,637,000
Jumlah Pendapatan	431,857,000	604,161,000	1,482,586,000
DAU			
Belanja pegawai	185,205,000	317,280,000	400,115,000
kegiatan oprasional kantor Desa	35,535,000	47,779,000	83,873,000
Belanja barang dan jasa	25,000,000	27,069,000	32,039,000
Belanja modal	20,050,000	20,710,000	29,572,000
Kegiatan oprasional BPD	1,000,000	1,500,000	2,050,000
Perencanaan Pembangunan desa	15,000,000	20,000,000	27,000,000
Pengelolaan informasi Desa	6,250,000	7,800,000	9,375,000
Penyusunan dan Pembuatan RPJM Desa	27,895,000	39,925,000	41,541,000
Penyusunan dan pembuatan RKP Desa	25,500,000	31,390,000	32,915,000
Pendapatan data dasar keluarga	1,885,000	3,950,000	5,000,000
Jumlah	517,403,000	318,320,000	663,480,000
Pembangunan Desa			
Belanja barang dan jasa Desa	12,330,000	13,321,000	11,080,000
Belanja modal Pengadaan jalan desa	475,875,000	563,286,000	194,216,000
Jumlah	488,205,000	576,607,600	205,296,000
Kuala Musam			
PAD			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9,600,000	9,600,000	9,600,000
Pendapatan Transfer	180,723,000	160,576,000	200,510,000
Dana Desa	75,889,000	68,521,000	90,000,000
Bagi Hasil Pjk dan Retribusi	7,950,000	5,995,000	6,500,000
Alokasi Dana Desa	65,244,000	64,000,000	70,953,000
Jumlah Pendapatan	339,406,000	308,692,000	377,563,000
DAU			
Belanja pegawai	235,875,000	250,335,000	295,550,000
kegiatan oprasional kantor Desa	15,900,000	12,300,000	15,000,000
Belanja barang dan jasa	30,000,000	32,200,000	32,750,000
Belanja modal	16,735,000	15,150,000	17,100,000
Kegiatan oprasional BPD	1,200,000	2,000,000	1,000,000
Perencanaan Pembangunan desa	15,800,000	14,200,000	16,350,000

Pengelolaan informasi Desa	7,330,000	7,800,000	8,100,000
Penyusunan dan Pembuatan RPJM Desa	21,105,000	22,000,000	22,785,000
Penyusunan dan pembuatan RKP Desa	18,800,000	18,550,000	19,250,000
Pendapatan data dasar keluarga	1,500,000	2,000,000	2,500,000
Jumlah	364,245,000	376,535,000	430,000,000
Pembangunan Desa			
Belanja barang dan jasa Desa	10,050,000	11,800,000	12,650,000
Belanja modal Pengadaan jalan desa	180,877,000	225,975,000	365,800,000
Jumlah	190,927,000	237,775,000	378,450,000
PAD			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12,000,000	12,000,000	12,000,000
Pendapatan Transfer	240,543,000	354,443,000	1,476,586,000
Dana Desa	100,698,000	125,035,000	90,000,000
Bagi Hasil Pjk dan Retribusi	7,950,000	5,995,000	6,500,000
Alokasi Dana Desa	65,244,000	64,000,000	70,953,000
Jumlah Pendapatan	325,737,000	561,473,000	1,656,039,000
DAU			
Belanja pegawai	235,875,000	317,280,000	400,115,000
kegiatan oprasional kantor Desa	15,900,000	47,779,000	83,873,000
Belanja barang dan jasa	30,000,000	27,069,000	32,039,000
Belanja modal	16,735,000	20,710,000	29,572,000
Kegiatan oprasional BPD	1,200,000	1,500,000	2,050,000
Perencanaan Pembangunan desa	15,800,000	20,000,000	16,350,000
Pengelolaan informasi Desa	7,330,000	7,800,000	8,100,000
Penyusunan dan Pembuatan RPJM Desa	21,105,000	39,925,000	22,785,000
Penyusunan dan pembuatan RKP Desa	18,800,000	31,390,000	19,250,000
Pendapatan data dasar keluarga	1,500,000	3,950,000	2,500,000
Jumlah	364,245,000	318,320,000	616,634,000
Pembangunan Desa			
Belanja barang dan jasa Desa	11,800,000	12,330,000	13,321,000
Belanja modal Pengadaan jalan desa	225,975,000	475,875,000	563,286,000
Jumlah	237,775,000	488,205,000	576,607,600

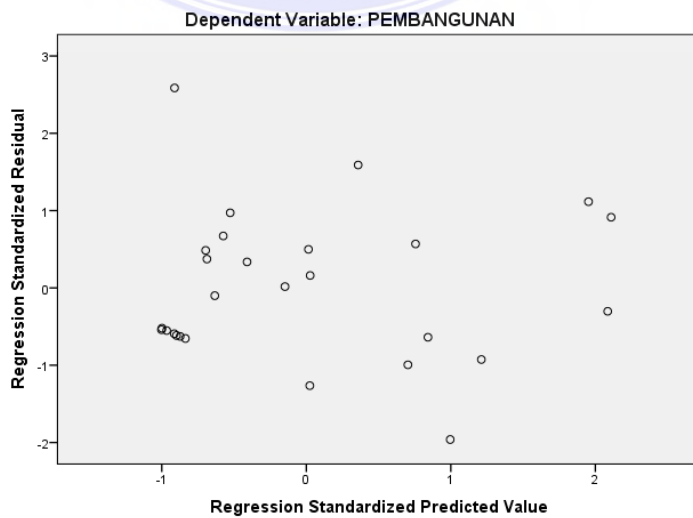
UJI ASUMSI KLASIK



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: PEMBANGUNAN



Scatterplot



UJI MULTIKOLONIERITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	86005811.978	42345784.615		2.031	.053		
	PAD	.544	.188	.475	2.893	.008	.990	1.011
	DAU	.589	.232	.417	2.542	.018	.990	1.011

a. Dependent Variable: PEMBANGUNAN

UJI HIPOTESIS

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.600 ^a	.359	.306	149777411.183

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: PEMBANGUNAN

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30210187427947 4750.000	2	15105093713973 7376.000	6.733	.005 ^b
	Residual	53839854961512 3780.000	24	22433272900630 156.000		
	Total	84050042389459 8530.000	26			

a. Dependent Variable: PEMBANGUNAN

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	86005811.978	42345784.615		2.031	.053		
	PAD	.544	.188	.475	2.893	.008	.990	1.011
	DAU	.589	.232	.417	2.542	.018	.990	1.011

a. Dependent Variable: PEMBANGUNAN